

Senin, 2 Februari 2026

1. [HOAKS] Anies Laporkan Jokowi Terkait Kasus Dugaan Ijazah Palsu



Penjelasan:

Beredar unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melaporkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) terkait kasus dugaan ijazah palsu.

Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari [kompas.com](https://www.kompas.com), setelah ditelusuri, beberapa klip dalam video dalam unggahan tidak terkait dengan narasi tersebut. Hingga saat ini, tidak ada informasi valid Anies Baswedan melaporkan Jokowi dalam kasus dugaan ijazah palsu.

Hoaks

Link Counter :

- <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2026/01/28/143200582/-hoaks-anies-laporkan-jokowi-terkait-kasus-dugaan-ijazah-palsu>

Senin, 2 Februari 2026

2. [HOAKS] Situs Web Mengatasnamakan Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi



Penjelasan:

Beredar portal atau situs web mengatasnamakan Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi. Situs tersebut menampilkan logo Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Faktanya, situs tersebut adalah palsu. Dilansir dari akun Instagram Kabupaten Bekasi Saber Hoaks [@bekasikab.saberhoaks](https://www.instagram.com/bekasikab.saberhoaks), situs resmi Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi hanya menggunakan domain bekasikab.go.id dan disperdag.bekasikab.go.id. Keberadaan situs tidak resmi berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik serta dapat menjadi sarana *phising*, penipuan, atau penyalahgunaan data yang merugikan.

Hoaks

Link Counter :

- <https://www.instagram.com/p/DUHuz4xkqrm/>

Senin, 2 Februari 2026

3. [HOAKS] KUHP Disahkan untuk Melumpuhkan Menkeu Purbaya



Penjelasan:

Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dilakukan dengan tujuan melumpuhkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, KUHP baru merupakan UU Nomor 1 Tahun 2023 yang disahkan sejak 2022 dan resmi berlaku 2 Januari 2026, menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda. Tidak ada pernyataan resmi atau pemberitaan kredibel yang menyebut pengesahan KUHP bertujuan melumpuhkan Menteri Keuangan. Narasi yang beredar diduga keliru mengaitkan kritik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) terhadap KUHP, yang mengatur prosedur hukum acara pidana, dengan KUHP yang mengatur substansi tindak pidana. Kritik tersebut tidak menasar Purbaya secara langsung dan tidak membuktikan adanya pelemahan Kementerian Keuangan. Dengan demikian, klaim bahwa KUHP disahkan untuk melumpuhkan Purbaya adalah salah dan menyesatkan.

Hoaks

Link Counter :

- <https://tirto.id/tidak-tepat-kuhp-disahkan-untuk-melumpuhkan-menkeu-purbaya-hpDE>